

4-30-2002

Hegemoni budaya dalam politik Orde baru

Safrina Safrina

Follow this and additional works at: <https://scholarhub.ui.ac.id/wacana>

Recommended Citation

Safrina, Safrina (2002) "Hegemoni budaya dalam politik Orde baru," *Wacana, Journal of the Humanities of Indonesia*: Vol. 4: No. 1, Article 9.

DOI: 10.17510/wjhi.v4i1.264

Available at: <https://scholarhub.ui.ac.id/wacana/vol4/iss1/9>

This Book Review is brought to you for free and open access by the Faculty of Humanities at UI Scholars Hub. It has been accepted for inclusion in Wacana, Journal of the Humanities of Indonesia by an authorized editor of UI Scholars Hub.

Hegemoni Budaya dalam Politik Orde Baru

Krishna Sen dan David T. Hill, *Media, Budaya dan Politik di Indonesia*, terj. Sirikit Syah (Jakarta: Institut Studi Arus Indonesia dan PT Media Lintas Inti Nusantara, 2001), xv + 282 halaman.

Berdasarkan penelitian lapangan selama enam bulan di Yogyakarta, Krishna Sen dan David T. Hill menyusun buku *Media, Budaya dan Politik di Indonesia* untuk mendapatkan jawaban atas isu-isu yang berakar dari pertanyaan bagaimana media, kebudayaan dan politik diartikulasikan. Pertanyaan itu menjadi tema besar buku ini dan memayungi sejumlah pertanyaan lain yang jawabannya merekonstruksi dinamika interaksi media-penguasa-audien yang membentuk hegemoni budaya dan politik di Indonesia pada masa awal Orde Baru sampai lengsernya Soeharto.

Dengan konteks sejarah itu, Sen dan Hill memilih definisi teks media secara luas, yaitu "teks yang terkomersialisasi, direproduksi secara mekanis, dan didistribusikan secara luas" (h. 10) dan telah menganalisis tujuh *genre* teks media, yakni buku, media cetak, radio, televisi, sinema, musik dan internet. Data dari ketujuh *genre* teks media itu berasal dari analisis dokumen, wawancara, dan observasi yang diolah untuk melihat bagaimana media diposisikan oleh penguasa, reaksi apa yang muncul dari pihak pengelola teks serta bagaimana terjadinya, dan bagaimana pembaca menanggapi teks-teks itu.

Analisis mereka mengungkapkan bahwa penguasa Orde Baru memperlakukan media sebagai alat untuk mempertahankan kepentingan politis yang mengatasnamakan "persatuan dan kesatuan" yang berupaya menghadirkan suatu "budaya nasional." Asumsi itu kemudian diterjemahkan ke dalam beragam peraturan tindakan, ucapan, ataupun sikap yang cenderung represif, membatasi ruang gerak media, dan menuntut adanya keseragaman ataupun ketertiban dalam kebudayaan melalui media. Dengan kata lain, "Ketidaktertiban (*disorder*) adalah antitesis Orba" (h. 213). Ketidaktertiban ini timbul dalam setiap *genre* yang diteliti sebagai bentuk reaksi atas represi dari pihak penguasa. Setiap *genre* memunculkan jenis ketidaktertiban yang unik walaupun semuanya selalu dalam pola interaksi dengan isu-isu lokal dan global. Isu-isu lokal dan global itulah yang menjadi pemicu munculnya konflik dengan kehendak penguasa Orde Baru yang menggariskan pentingnya suatu "identitas budaya nasional."

Setiap bab mengupas satu *genre* teks media dengan analisis yang dimulai dengan konteks sejarahnya sejak awal Orde Baru, peran dan fungsinya bagi penguasa pada waktu itu, ketidaktertiban yang muncul dan pergulatan yang timbul karenanya. Teks media dianalisis berdasarkan data yang diambil dari sejumlah kasus yang mengindikasikan terjadinya konflik. Sen dan Hill menunjukkan bahwa konflik bahkan muncul pada tingkat identifikasi ketika kebijakan atau peraturan batasan untuk istilah

“buku” (h. 26) atau “sastra” (h. 28). Kecenderungan yang kemudian muncul adalah batasan buku atau sastra yang “baik” dan “buruk” dalam kerangka ketertiban yang bersifat politis, artinya dianggap tidak akan memicu keresahan dalam masyarakat. Politisasi sensor atau pelarangan buku, akibatnya, mengesankan ketidakajegan penguasa. Sebagai contoh, buku ini membandingkan cerita *Lupus* yang sarat dengan ikon global dengan karya Wiji Thukul yang kental dengan masalah domestik. Sen dan Hill berkesimpulan bahwa bagi penguasa, ikon global dalam *Lupus* tidak mengancam ketertiban bangsa, dan tidak demikian dengan karya Wiji Thukul. Dari perspektif penguasa, sikap kritis dalam karya yang bersifat lokal dianggap lebih mengancam daripada gempuran global, selama gempuran tersebut dinilai apolitis (h. 53).

Konflik lain yang tampak dari analisis Sen dan Hill adalah ketika digariskan suatu identitas budaya nasional yang mengangkat “persatuan” dan “kesatuan” nasional, dan menekan isu-isu SARA (suku, agama, ras, antargolongan), muncul teks-teks media yang justru menjamur karena kesadaran pengelola media akan kebutuhan masyarakat akan isu lokal. Kebutuhan itu secara komersial ditangkap oleh pengelola media cetak sehingga konglomerasi media besar seperti *Jawa Pos* merangkul *Surabaya Post* untuk memperluas pasar dengan cara memelihara perspektif dan berita lokal. Hal serupa tampak juga pada radio-radio swasta yang berhasil mengikat kesetiaan pendengarnya melalui penciptaan identitas komunal yang sangat sadar akan isu-isu lokal (h. 106), walaupun penguasa Orde Baru mewajibkan radio swasta untuk *me-relay* berita Radio Republik Indonesia selama 140 menit dalam 24 jam. Radio telah secara signifikan berperan dalam demokratisasi Indonesia dengan cara menampung dan menjadi sumber opini publik (h. 118).

Bab-bab lain yang mengulas *genre* teks media televisi, sinema, musik, dan internet mencatat hal-hal serupa yang terkait dengan isu-isu lokal dan global. Televisi, misalnya, yang dianggap sebagai media dengan kontrol pusat paling ketat menjadi ajang pergulatan antara kepentingan penguasa dan pengaruh-pengaruh global, maupun lokal. Hal itu semakin terasa ketika dihadirkan transmisi satelit Palapa dan privatisasi televisi. Kedua hal itu selain memperkuat arus informasi pusat ke daerah ternyata mendatangkan ancaman global dan lokal terhadap ‘ketertiban’ nasional.

Isu pergulatan global-lokal-kepentingan-penguasa juga muncul dalam dinamika teks media sinema. Yang paling menonjol mewakili dinamika teks media sinema ini adalah perlambangan dalam film *Surat untuk Bidadari* karya Garin Nugroho. Film ini menyiratkan bagaimana kepentingan penguasa menjelma dalam “budaya nasional” yang hadir lewat pendidikan formal dan meminggirkan budaya lokal dan bagaimana ikon global menjadi alat perjuangan lokal dalam menghadapi gempuran kepentingan penguasa.

Dalam kenyataannya, Sen dan Hill melihat bahwa sinema nasional Indonesia seperti teks media lain diupayakan agar berada dalam

kungkungan garis yang ditentukan penguasa, dalam hal ini Departemen Penerangan. Berbagai ketentuan kemudian menggariskan bahwa sinema harus menunjukkan bahwa negara memiliki kendali total atas suatu bangsa yang bersatu sehingga film Indonesia harus mengikuti struktur naratif tertentu seperti hukum harus selalu berhasil ditegakkan walaupun tidak sesuai kenyataan. Sebagai contoh, kasus film *Perawan Desa* (1978) yang sempat ditahan Badan Sensor Film (BSF) selama satu tahun karena isinya menggugat ketidakadilan negara atau pemerintah terhadap rakyat kecil korban perkosaan. Film itu akhirnya "dilepas" BSF setelah isi ceritanya diubah.

Seperti *genre* teks media lainnya, musik dan internet juga menyodorkan ketidaktertibn pada penguasa. Kedua teks media itu digolongkan sebagai teks yang sulit ditertibkan terutama ketika dikaitkan dengan audiensnya. Musik ketika dapat ditertibkan, misalnya pertunjukan dangdut yang disponsori ABRI, digunakan sebagai alat kampanye. Di lain pihak, pemusik seperti Iwan Fals dilarang tampil karena selain penontonnya sering rusuh, liriknya pun dianggap sering bertabrakan dengan kepentingan penguasa. Audiens internet membawa permasalahan lain. Keluasan dan kejamakan jangkauan internet menyulitkan penertiban sehingga internet sangat berperan dalam penyebaran informasi yang membawa tumbangnya Orde Baru.

Melibatkan banyak sumber data dengan analisis deskriptif kualitatif yang luas, penelitian ini menggambarkan kecermatan penulisnya dalam melakukan analisis silang dari berbagai sumber datanya tersebut. Pemaparan dalam buku ini menunjukkan upaya untuk bersikap adil walaupun kadang tidak dijelaskan alasan pemilihan sumber data tersebut, misalnya menentukan Pramoedya Ananta Toer dan Wiji Thukul sebagai "wakil" *genre* sastra yang dibungkam penguasa dari sekian banyak penulis terbungkam lainnya pada masa Orde Baru.

Secara keseluruhan ulasan yang komprehensif dari banyak sumber data berhasil mengartikulasikan suatu dinamika interaksi yang terjadi antara media, budaya dan politik di Indonesia pada konteks kesejarahan tertentu. Kekuatan penelitian ini, seperti tergambar dalam pemaparannya, terletak pada kecermatan validasi antarsumber data disertai analisis yang argumentatif sehingga dapat dilihat bagaimana media sebagai suatu *contested site* diterjemahkan, diposisikan, serta digunakan oleh para pelakunya, secara sadar ataupun tidak, dalam upaya-upaya konstruksi suatu hegemoni budaya dan politik. Dengan alasan itu buku ini akan sangat bermanfaat di antaranya bagi para peminat penelitian kualitatif yang berniat menerjemahkan makna-makna dari pergulatan budaya dalam masyarakat.